



Sitti Qamariatul  
 Waqiah<sup>1</sup>  
 Syamsul Arifin<sup>2</sup>

## PERAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT TAMPOJUNG PREGI WARU PAMEKASAN

### Abstrak

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum masyarakat. Di daerah tertentu, seperti di Desa Tampojung Pregi Waru, Pamekasan, kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan besar. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum di Tampojung Pregi Waru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan formal dan nonformal memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan hukum masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan terkait keterbatasan akses pendidikan dan pemahaman hukum. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan perlu diperkuat dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan kesadaran hukum di desa ini dapat meningkat secara signifikan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih taat hukum dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Kesadaran Hukum, Masyarakat, Tampojung Pregi Waru, Pamekasan

### Abstract

Education plays an important role in shaping the character and legal awareness of the community. In certain areas, such as in Tampojung Pregi Waru Village, Pamekasan, community legal awareness remains a major challenge. This article aims to explore the role of education in fostering legal awareness in the community. Through a qualitative approach with observation and interview methods, this research explores the factors that influence the level of legal awareness in Tampojung Pregi Waru. The results show that formal and non-formal education plays an important role in improving people's understanding and acceptance of the law, although there are still challenges related to limited access to education and legal understanding. Therefore, efforts to increase legal awareness through education need to be strengthened with support from the government and local communities. With strong support from various parties, it is expected that legal awareness in this village can increase significantly, thus creating a more law-abiding and just society.

**Keywords:** Education, Legal Awareness, Community, Tampojung Pregi Waru, Pamekasan

### PENDAHULUAN

Pendidikan, baik formal maupun nonformal, memegang peranan yang sangat vital dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pendidikan formal yang diperoleh di sekolah memberikan pengetahuan dasar tentang hukum, hak, dan kewajiban warga negara. Sementara itu, pendidikan nonformal yang diselenggarakan melalui penyuluhan hukum, pelatihan, dan diskusi masyarakat memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari. Melalui kedua bentuk pendidikan tersebut, masyarakat diharapkan mampu memahami betapa pentingnya supremasi hukum bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan berkeadilan (Bramantyo dan Suwarno 2020; Lubis & Ritonga, 2023).

<sup>1,2</sup>STIS As-Slafiyah Sumber Duko Pakong Pameksan Madura  
 email: kikiwaqiah10@gmail.com, syamsularifin181@gmail.com

Akan tetapi, meskipun sebagian besar masyarakat Tambojung Pregi Waru telah mengenyam pendidikan, namun kesadaran hukum yang rendah masih menjadi permasalahan utama. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah minimnya akses terhadap pendidikan hukum yang lebih mendalam dan praktis. Pendidikan yang ada seringkali hanya sebatas teori-teori dasar yang kurang memberikan pemahaman yang cukup tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat di desa ini juga belum sepenuhnya memahami hak-haknya sebagai warga negara dan kewajibannya untuk menaati hukum. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam menyelesaikan sengketa secara hukum dan seringnya terjadi konflik yang tidak diselesaikan melalui jalur hukum. (Sumitro dan Imam Yuliadi 2019)

Selain itu, faktor budaya setempat yang masih kental dalam masyarakat Tambojung Pregi Waru turut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum. Beberapa adat istiadat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat tidak selalu sejalan dengan peraturan hukum negara. Misalnya dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat sering kali lebih mengutamakan penyelesaian secara adat daripada melalui jalur hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan hukum telah diberikan, pemahaman dan penerimaan terhadap hukum positif yang berlaku di negeri ini masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memadukan pendidikan hukum dengan nilai-nilai lokal agar masyarakat dapat melihat relevansi hukum dalam kehidupan mereka (Hasibuan dan Toni 2023).

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan tokoh agama setempat yaitu Bapak Ismail, untuk mengatasi permasalahan rendahnya kesadaran hukum di Desa Tambojung Pregi Waru, maka peningkatan mutu pendidikan hukum sangatlah penting. Bapak Ismail menegaskan bahwa meskipun masyarakat desa telah mengenyam pendidikan formal, namun materi yang diajarkan tentang hukum masih sangat terbatas dan lebih bersifat teoritis. Kurikulum yang diajarkan di sekolah pada umumnya kurang menggali pemahaman praktis tentang hak dan kewajiban hukum, yang menyebabkan masyarakat kurang memahami secara mendalam bagaimana hukum dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu menurutnya diperlukan kurikulum pendidikan yang lebih aplikatif, yang dapat menghubungkan teori hukum dengan situasi sosial budaya setempat di Tambojung Pregi Waru. Kurikulum seperti ini akan lebih mudah diterima dan lebih relevan dengan kehidupan nyata masyarakat desa.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan memahami pandangan masyarakat terhadap kesadaran hukum di Desa Tambojung Pregi Waru. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara mendalam dengan warga sekitar, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan permasalahan hukum dan pendidikan di desa tersebut. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki pemahaman yang cukup tentang penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran hukum. (Jasmine, 2014; Lubis, 2023)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pendidikan dan Penyadaran Hukum di Masyarakat Tambojung Pregi Waru**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia, yang tidak hanya mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga penting dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Di Desa Tambojung Pregi Waru, pendidikan formal menghadapi berbagai tantangan yang cukup berarti yang menghambat peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sarana pendidikan dan belum memadainya mutu pengajaran, khususnya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dan hukum. Namun demikian, pendidikan formal masih dianggap sebagai jalur utama dalam menumbuhkan kesadaran hukum, mengingat sekolah merupakan tempat pertama yang mengenalkan masyarakat kepada hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Tindangen 2017; Ritonga et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Parto, tokoh masyarakat Desa Tampojung Pregi Waru, permasalahan terbatasnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, khususnya pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, memang menjadi tantangan besar dalam membangun kesadaran hukum. Bapak Parto mengungkapkan bahwa di sekolah, meskipun siswa diajarkan tentang dasar-dasar hukum seperti hak dan kewajiban warga negara serta pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, namun materi yang diberikan seringkali hanya bersifat teoritis. Dalam pembelajaran hukum, siswa hanya menerima pengetahuan tentang hukum negara secara umum, tanpa mengaitkannya dengan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakatnya.

#### **Peran Pendidikan Nonformal dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum**

Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal memegang peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat Desa Tampojung Pregi Waru. Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan lainnya, terbukti memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Program-program seperti pelatihan hukum, seminar, dan penyuluhan hukum di tingkat desa memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-haknya sebagai warga negara, serta kewajibannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Wulandari 2019; Darlis et al., 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail, tokoh agama di Desa Tampojung Pregi Waru, penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat setempat. Bapak Ismail menjelaskan bahwa masyarakat desa cenderung lebih mudah menerima informasi yang disampaikan oleh tokoh yang mereka kenal dan hormati, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat ini terbukti lebih efektif karena tokoh-tokoh tersebut sudah memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan tentang pentingnya hukum dapat lebih mudah diterima dan dipahami.

#### **Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Meskipun program pendidikan nonformal tersebut telah terbukti efektif, namun tantangan utama yang masih dihadapi adalah masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi tersebut antara lain adalah kurangnya kesadaran awal akan pentingnya pemahaman hukum serta terbatasnya waktu dan akses terhadap kegiatan pendidikan nonformal. Kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum seringkali dilaksanakan di luar jam kerja atau di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk sehingga tidak semua warga masyarakat dapat berpartisipasi. Selain itu, banyak warga desa yang belum menyadari pentingnya pengetahuan hukum sehingga kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut (Hasugian 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lastri, mahasiswa Magister Hukum di Desa Tampojung Pregi Waru, penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkala memang sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, Ibu Lastri menekankan pentingnya strategi yang lebih terarah dan sistematis. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat atau perangkat desa, seperti tokoh agama atau ketua RT, dalam mendekati penyuluhan hukum kepada masyarakat.

#### **Pendidikan Formal dan Nonformal untuk Kesadaran Hukum yang Lebih Baik**

Pentingnya kolaborasi antara pendidikan formal dan nonformal semakin nyata dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Kedua bentuk pendidikan ini harus saling melengkapi agar dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih utuh dan aplikatif. Integrasi antara pendidikan formal dan nonformal dapat menjadi kunci penguatan kesadaran hukum baik pada level individu maupun komunitas. Misalnya, materi hukum yang diajarkan di sekolah dapat diperkuat dengan sesi penyuluhan hukum praktis di masyarakat. Penyuluhan ini tidak hanya membahas konsep hukum secara teori tetapi juga mengajarkan cara penyelesaian permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Bramantyo dan Suwarno 2020).

Berdasarkan hasil penelitian bersama Bapak Muhasan, salah satu warga Desa Tampojung Pregi Waru, penyuluhan hukum yang dilakukan di tingkat desa sangat penting untuk

mengenalkan praktik hukum nyata yang sering dihadapi oleh masyarakat. Bapak Muhasan menegaskan bahwa masyarakat sering kali merasa kesulitan ketika dihadapkan pada permasalahan hukum yang berdampak pada kehidupan mereka, seperti sengketa tanah, pelanggaran hukum, atau permasalahan perdata lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyuluhan hukum untuk tidak hanya memberikan pemahaman hukum secara teoritis saja, tetapi juga menyajikan informasi yang lebih aplikatif dan berhubungan langsung dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi sehari-hari.

Selain itu, penyuluhan hukum yang dilakukan di tingkat desa dapat mengenalkan praktik hukum nyata yang sering dihadapi oleh masyarakat. Misalnya, bagaimana cara melaporkan pelanggaran hukum atau prosedur hukum apa saja yang harus ditempuh dalam kasus sengketa tanah atau perkara perdata. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui hukum secara umum, tetapi juga memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks kehidupan mereka. Hal ini akan membantu mereka lebih siap untuk menaati hukum, sekaligus ikut berperan dalam upaya menjaga ketertiban dan keadilan sosial di tingkat daerah.

### **Kontribusi Pendidikan bagi Masyarakat yang Lebih Tertib dan Adil**

Secara keseluruhan, meskipun tantangan dalam peningkatan kesadaran hukum di Desa Tampojung Pregi Waru cukup besar, namun pendidikan tetap menjadi solusi utama untuk membangun pemahaman dan kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat. Dengan memperkuat akses pendidikan hukum yang lebih relevan dengan konteks sosial budaya setempat, serta melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat, diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan semakin meningkat. Pendekatan yang lebih inklusif ini tidak hanya akan membantu masyarakat memahami pentingnya hukum, tetapi juga akan membuat mereka lebih siap dalam menjalankan kewajiban hukum. (Andriani 2023)

Berdasarkan hasil penelitian bersama Bapak Muhasan, salah satu warga Desa Tampojung Pregi Waru, penyuluhan hukum yang dilakukan di tingkat desa sangat penting untuk mengenalkan praktik hukum nyata yang sering dihadapi oleh masyarakat. Bapak Muhasan menegaskan bahwa masyarakat sering kali merasa kesulitan ketika dihadapkan pada permasalahan hukum yang berdampak pada kehidupan mereka, seperti sengketa tanah, pelanggaran hukum, atau permasalahan perdata lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyuluhan hukum untuk tidak hanya memberikan pemahaman hukum secara teoritis saja, tetapi juga menyajikan informasi yang lebih aplikatif dan berhubungan langsung dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi sehari-hari.

Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pendidikan hukum, baik melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan nonformal di masyarakat, maupun melalui penyuluhan hukum berbasis masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya masyarakat yang lebih tertib, adil, dan taat hukum. Dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya, serta cara mengakses dan menaati hukum, diharapkan akan tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis, yang pada akhirnya akan memperkuat keadilan sosial dan sistem hukum yang ada.

### **Tantangan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Desa Tampojung Pregi Waru**

Meskipun pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat, namun terdapat sejumlah tantangan signifikan yang menghambat peningkatan kesadaran hukum di Desa Tampojung Pregi Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses pendidikan yang bermutu, khususnya pendidikan yang menitikberatkan pada pemahaman hukum dan pentingnya kesadaran hukum di masyarakat. Meskipun sebagian besar penduduk desa telah mengenyam pendidikan dasar, namun materi yang diajarkan seringkali belum cukup mendalam untuk memberikan pemahaman tentang hukum, hak hukum, dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, meskipun masyarakat telah mengenyam pendidikan formal, mereka cenderung belum memiliki wawasan yang memadai tentang aspek hukum yang berlaku di Indonesia (Masyarakat Hukum Indonesia 2020).

Hasil penelitian bersama Bapak Maulidi, Kepala Desa Tampojung Pregi Waru, menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan prosedur hukum sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap proses hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat enggan melibatkan diri dalam proses hukum meskipun mereka memiliki hak untuk

mendapatkan perlindungan hukum atau penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Kurangnya pemahaman ini sering kali berujung pada keengganan untuk melibatkan pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah.

Bapak Maulidi juga menambahkan bahwa kecenderungan penyelesaian masalah melalui jalur adat seringkali berujung pada ketidakadilan atau penyelesaian yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena dalam banyak kasus, masyarakat kurang mengetahui atau kurang memahami hak-hak hukumnya yang seharusnya dilindungi oleh sistem hukum negara. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang prosedur hukum, mereka tidak mengetahui bagaimana memperjuangkan hak-haknya dengan baik, atau bagaimana menyelesaikan sengketa secara hukum.

### **Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum**

Selain keterbatasan akses terhadap pendidikan hukum, adat istiadat dan tradisi sosial budaya setempat juga menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kesadaran hukum di Desa Tampojung Pergi Waru. Masyarakat di desa ini, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, sangat memegang teguh nilai-nilai adat dan adat istiadat yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Sebagian besar dari mereka lebih memilih menyelesaikan masalah melalui pendekatan adat atau kekeluargaan, yang mereka anggap lebih efektif dan sesuai dengan budaya mereka (Hasibuan dan Toni 2023)

Hasil penelitian bersama Bapak Parto, salah satu tokoh masyarakat di Desa Tampojung Pergi Waru, terungkap bahwa kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan melalui cara kekeluargaan atau dengan melibatkan tokoh adat seringkali tidak sejalan dengan ketentuan hukum negara yang berlaku. Masyarakat khususnya di daerah ini lebih memilih cara adat karena mereka merasa cara tersebut lebih sederhana, cepat, dan mengutamakan kerukunan sosial. Penyelesaian perselisihan melalui adat dianggap sebagai cara yang sudah diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan bagian dari nilai-nilai budaya mereka.

### **Pendidikan Hukum Peka Budaya Lokal**

Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum adat, diperlukan pendidikan hukum yang peka terhadap budaya setempat. Pendidikan hukum yang hanya memberikan pengetahuan tentang hukum negara tanpa mempertimbangkan nilai-nilai setempat tidak akan efektif dalam menciptakan kesadaran hukum yang mendalam di masyarakat. Sebaliknya, pendidikan yang mampu memadukan nilai-nilai adat dengan hukum negara akan lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat (Departemen Pendidikan Nasional, 2011).

Hasil kajian bersama Bapak Ismael, tokoh agama di Desa Tampojung Pergi Waru, menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan hukum yang memadukan hukum negara dengan adat istiadat setempat dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Bapak Ismael mengemukakan bahwa pendidikan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada teori hukum negara saja, tetapi juga menjelaskan bagaimana hukum negara dapat berjalan beriringan dengan adat istiadat setempat, akan memberikan pemahaman yang lebih holistik kepada masyarakat. Pendidikan seperti ini membuat masyarakat dapat melihat bahwa hukum negara tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang terpisah atau bertentangan dengan hukum adat yang telah berlaku sejak lama. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi dan mendukung dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih baik.

### **Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Tokoh Masyarakat**

Untuk mencapai tujuan peningkatan kesadaran hukum secara lebih efektif, diperlukan kerja sama antara berbagai unsur masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan agar kurikulum pendidikan yang diberikan di sekolah tidak hanya mengajarkan teori hukum, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih aplikatif tentang fungsi hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, pemerintah desa harus memfasilitasi program penyuluhan hukum yang lebih terstruktur dan rutin (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).

Hasil penelitian bersama Ibu Lastris, mahasiswa Magister di Tampojung Pergi Waru, mengungkapkan bahwa penyuluhan hukum yang efektif harus disesuaikan dengan konteks budaya setempat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan, terutama di desa-desa yang memiliki ciri budaya dan adat istiadat yang kuat.

Penyuluhan yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat yang pada umumnya lebih mengenal nilai-nilai sosial dan budayanya sendiri.

### **B. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Desa Tampojung Pregi Waru**

Menghadapi tantangan rendahnya kesadaran hukum di Desa Tampojung Pregi Waru, peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan bermutu yang dapat mengenalkan dan memperkuat pemahaman hukum masyarakat. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyediakan sarana pendidikan yang memadai di tingkat desa. Sarana pendidikan yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, baik di sekolah dasar maupun menengah. Tanpa sarana yang memadai, mutu pendidikan hukum yang diterima masyarakat akan terbatas. Pemerintah harus memastikan sekolah-sekolah di desa dilengkapi dengan sarana yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran yang relevan, serta perangkat pembelajaran yang dapat mendukung pemahaman hukum yang lebih mendalam. (Hasugian 2022)

Pentingnya pendidikan tentang hak dan kewajiban hukum warga negara juga harus dipahami oleh pemerintah dalam merancang kurikulum pendidikan. Saat ini, banyak kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih kurang mengajarkan materi hukum secara komprehensif. Materi pendidikan kewarganegaraan saat ini masih terlalu umum dan kurang menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkenalkan kurikulum yang lebih terpadu dengan materi yang menekankan tidak hanya teori hukum tetapi juga praktik dan penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memahami hukum dari sudut pandang akademis tetapi juga dapat melihat dan merasakan secara langsung pentingnya hukum dalam masyarakat.

#### **Penyuluhan Hukum Oleh Pemerintah Desa**

Selain itu, pemerintah desa juga memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di tingkat lokal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan hukum secara berkala. Penyuluhan ini dapat diselenggarakan dalam bentuk seminar, workshop, atau pertemuan langsung dengan melibatkan warga desa, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum. Banyak warga di Desa Tampojung Pregi Waru yang mungkin belum menyadari pentingnya hukum atau bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak-hak hukum yang perlu dilindungi. Dengan adanya penyuluhan hukum, mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, misalnya jika mengalami perselisihan atau merasa dirugikan oleh pihak lain (Masyarakat Hukum Indonesia 2020).

Hasil kajian bersama Kepala Desa Tampojung Pregi Waru menegaskan pentingnya penyuluhan hukum yang tidak hanya sekedar memberikan teori hukum tetapi juga mencakup informasi praktis yang dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan yang menitikberatkan pada aspek praktis ini sangat penting karena masyarakat sering kali merasa kesulitan atau bingung dalam menghadapi situasi hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, selain memahami asas-asas dasar hukum, mereka juga perlu mengetahui bagaimana cara mengakses keadilan dan terlibat dalam sistem hukum secara efektif.

#### **Pendidikan Nonformal Sebagai Pendukung Kesadaran Hukum**

Selain pendidikan formal, penting juga untuk memperkuat pendidikan nonformal yang dapat langsung menjangkau masyarakat. Program pelatihan dan penyuluhan hukum di tingkat masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai format yang lebih fleksibel, seperti lokakarya, seminar, atau diskusi kelompok. Penyuluhan ini dapat melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk petani, pekerja, ibu rumah tangga, dan pemuda. Melalui penyuluhan berbasis masyarakat ini, masyarakat akan lebih mudah memahami hak-haknya sebagai warga negara, serta prosedur hukum yang berlaku dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka (Soekanto 2012).

Hasil penelitian bersama Bapak Baidowi, tokoh masyarakat Desa Tampojung Pregi Waru, menunjukkan bahwa selain memberikan pengetahuan dasar tentang hukum, pendidikan nonformal dapat berperan penting dalam meningkatkan kecerdasan hukum masyarakat. Salah satu aspek yang ditekankan adalah pentingnya pendidikan yang mengajarkan masyarakat cara-

cara bijak dalam menyelesaikan sengketa. Pendidikan hukum nonformal tidak hanya memberikan teori tetapi juga memberikan pengetahuan praktis tentang cara menyelesaikan masalah melalui jalur hukum yang sah, tanpa harus bergantung pada pihak yang lebih berkuasa atau menggunakan cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan hukum negara.

Pendidikan nonformal berbasis masyarakat, khususnya yang mengutamakan pendekatan interaktif dan melibatkan masyarakat secara langsung, sangat efektif dalam memperkuat pemahaman hukum mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka dapat mengakses jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum lainnya. Program penyuluhan hukum seperti ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak-hak hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan hukum di desa.

### **Sinergi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum**

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik di Desa Tampojung Pregi Waru, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan akses pendidikan yang bermutu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Pemerintah desa juga perlu memfasilitasi penyuluhan hukum secara berkala yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, lembaga pendidikan harus menyusun kurikulum yang tidak hanya mengajarkan teori hukum, tetapi juga cara-cara praktis untuk menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Semua pihak tersebut perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran hukum, yang pada gilirannya akan membantu masyarakat untuk lebih taat pada hukum, menjaga ketertiban sosial, dan mendorong terciptanya keadilan di tingkat lokal. (Bramantyo dan Suwarno 2020)

Dengan pendekatan yang terkoordinasi antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan kebijakan pemerintah yang mendukung, diharapkan masyarakat di Desa Tampojung Pregi Waru akan semakin sadar akan hak dan kewajiban hukumnya. Kesadaran hukum yang lebih tinggi akan menciptakan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan bebas hukum, serta lebih berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan hukum di tingkat lokal.

### **SIMPULAN**

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat, termasuk di Desa Tampojung Pregi Waru, Pamekasan. Sebagai salah satu faktor utama dalam pembentukan karakter, pendidikan dapat membantu membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang lebih sadar hukum. Namun, di tengah perkembangan zaman, masih banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah terbatasnya akses pendidikan yang bermutu, terutama yang menitikberatkan pada pemahaman hak dan kewajiban dalam konteks hukum. Pada jenjang pendidikan formal, meskipun sekolah-sekolah di Desa Tampojung Pregi Waru memberikan pemahaman dasar tentang hukum, namun materi yang diajarkan masih sangat terbatas dan sering kali tidak menghubungkan hukum dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kuatnya pengaruh budaya setempat, di mana banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah melalui cara-cara adat atau kekeluargaan, juga menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu digalakkan agar lebih kontekstual dan peka terhadap nilai-nilai lokal, agar masyarakat tidak merasa terasing dari hukum negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andraini, Ridha. 2023. "Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat untuk Taat Hukum." *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum* 3(3): 100–106. doi:10.56393/nomos.v3i3.1614.
- Bramantyo, Rizki Yudha, dan Suwarno. 2020. "Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa SMAN 7 Kota Kediri." *Sarjana* 14(2): 124–36. doi:10.30957/Cendekia.v14i2.627.Membangun.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pendidikan.

- Hasibuan, Erica Putri, dan Toni Toni. 2023. "Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Peraturan Sekolah (Studi Pada Siswa Kelas Xi Smas Rantauprapat)." *Jurnal penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 9(1): 365. Doi:10.30998/rdje.v9i1 .15819.
- Hasugian, Carita Ronauli. 2022. "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2(9): 328–36. doi:10.56393/device.v2i9.1594.
- Ikatan Hukum Indonesia. (2020). *Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum di Indonesia* . Jakarta: MHI Press.
- Jasmine, Khanza. 2014. "No Title No Title No Title." *Penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat (Anti Inversi) dan Kecepatan Pengadukan sebagai Upaya Menghambat Reaksi Inversi pada Sari Tebu* (2018): 17–25.
- Lubis, Y. W. (2023). *Pembentukan Karakter Unggul: Analisis Optimalisasi Pendidikan Melalui Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) Di MAN 2 Deli Serdang*. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 274–282. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.554>
- Lubis, Y., & Ritonga, A. (2023). *Mobilization School Program: Implementation of Islamic Religious Education Teacher Preparation in Elementary Schools*. *Jurnal At-Tarbiyat :Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.37758/jat.v6i1.632>
- Ritonga, A. A., Lubis, Y. W., Masitha, S., & Harahap, C. P. (2022). *Program Sekolah Penggerak Sebagai Inovasi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri 104267 Pegajahan*. *Jurnal Pendidikan*, 31(2), 195–206. <https://doi.org/10.32585/jp.v31i2.2637>
- Soerjono, Soekanto. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: Rajawali Pers.Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Pengetahuan Hukum: Sebuah Pengantar* . Yogyakarta: Kebebasan.
- Sumitro, dan Imam Yuliadi. 2019. "Peran Pendidikan dalam Membangun Kepedulian Sosial Masyarakat Bima." *Jurnal Pendidikan Sosial* 9(2): 149–54. doi:10.37630/jpi.v9i2.230.
- Tindangen, Leonard Samuel. 2017. "Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Domestik di Kota Manado." *Lex Et Societatis* 5(8): 13–18.
- Wulandari, Fuji. 2019. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia."